

PENGARUH ANGGARAN BERBASIS KINERJA DAN SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PEMERINTAH ACEH

Aulia Grina¹, Zulkifli Umar², Budi Safatul Anam³.

¹Universitas Muhammadiyah Aceh

²Universitas Muhammadiyah Aceh

³Universitas Muhammadiyah Aceh

*Korespondensi: auliagrina04@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of performance-based budgeting and human resources on budget quality in Aceh Provincial Government work units. A quantitative approach was employed using a survey method, with questionnaires distributed to 60 respondents directly involved in the budgeting process. The data were analyzed using multiple linear regression to test both partial and simultaneous effects among variables. The results indicate that performance-based budgeting and human resources have a positive and significant effect on budget quality, both individually and jointly. Performance-based budgeting shows a more dominant influence, followed by human resources. These findings suggest that outcome-oriented budgeting, supported by competent and capable personnel, enhances budget clarity, accountability, and effectiveness in regional financial management. This study provides practical implications for local governments to strengthen the implementation of performance-based budgeting and human resource development in order to improve public sector budget quality.

Keywords: performance-based budgeting, human resources, budget quality, local government, Aceh.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh anggaran berbasis kinerja dan sumber daya manusia terhadap kualitas anggaran pada Satuan Kerja Pemerintah Aceh. Pendekatan kuantitatif digunakan dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada 60 responden yang terlibat langsung dalam proses pengelolaan anggaran. Data dianalisis menggunakan regresi linear berganda untuk menguji pengaruh parsial dan simultan antarvariabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran berbasis kinerja dan sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas anggaran, baik secara parsial maupun simultan. Anggaran berbasis kinerja memiliki kontribusi pengaruh yang lebih dominan, diikuti oleh sumber daya manusia. Temuan ini mengindikasikan bahwa orientasi penganggaran yang berbasis hasil, didukung oleh kompetensi dan kapasitas aparatur yang memadai, mampu meningkatkan kejelasan sasaran, akuntabilitas, serta efektivitas pengelolaan anggaran daerah. Penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi pemerintah daerah untuk memperkuat implementasi anggaran berbasis kinerja

dan pengembangan kualitas sumber daya manusia guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan publik.

Kata kunci: anggaran berbasis kinerja, sumber daya manusia, kualitas anggaran, pemerintah daerah, Aceh.

1. PENDAHULUAN

Anggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting) merupakan pendekatan penganggaran yang menekankan keterkaitan antara alokasi sumber daya publik dengan hasil atau kinerja yang ingin dicapai, sehingga berfungsi sebagai instrumen utama dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah. Sistem ini memungkinkan evaluasi yang lebih objektif terhadap capaian program dan kegiatan melalui indikator kinerja yang terukur, sehingga pemerintah dapat menilai sejauh mana anggaran yang dialokasikan mampu menghasilkan manfaat publik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2018; Mauliansyah, 2017). Di Indonesia, penerapan anggaran berbasis kinerja secara formal mulai diperkenalkan sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.02/2004 sebagai bagian dari reformasi pengelolaan keuangan negara.

Berbagai studi dan laporan institusional menunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja berkontribusi positif terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah. Data Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengindikasikan bahwa instansi yang menerapkan sistem ini cenderung memiliki tingkat akuntabilitas yang lebih baik, tercermin dari meningkatnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan. Meskipun demikian, implementasi anggaran berbasis kinerja di tingkat daerah, termasuk di Aceh, masih menghadapi tantangan struktural dan operasional, terutama terkait keterbatasan pemahaman aparatur serta ketersediaan data kinerja yang akurat. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan sistem penganggaran tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung.

Dalam konteks tersebut, sumber daya manusia (SDM) memegang peranan strategis dalam menentukan efektivitas penerapan anggaran berbasis kinerja. SDM merupakan aset utama organisasi sektor publik karena berperan langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran. Pengelolaan SDM yang efektif terbukti mampu meningkatkan produktivitas dan kinerja organisasi secara keseluruhan (Dessler, 2013). Namun, laporan Badan Kepegawaian Negara (BKN) menunjukkan bahwa sebagian aparatur pemerintah daerah masih belum memperoleh pelatihan yang relevan dengan tugas dan fungsinya, yang berpotensi menurunkan kualitas pengelolaan anggaran dan pelayanan publik.

Kompetensi dan motivasi aparatur menjadi faktor kunci dalam menghasilkan anggaran yang berkualitas. Aparatur yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional yang memadai akan lebih mampu menyusun anggaran secara rasional, berbasis data, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, motivasi kerja yang tinggi mendorong aparatur untuk mencapai kinerja optimal dalam pengelolaan anggaran, sebagaimana ditegaskan oleh Robbins dan Judge (2017) yang menyatakan bahwa pegawai yang termotivasi cenderung menunjukkan kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu, pengembangan kapasitas SDM

melalui pelatihan berkelanjutan, penciptaan lingkungan kerja yang kondusif, serta pemberian insentif yang adil menjadi prasyarat penting dalam mendukung keberhasilan anggaran berbasis kinerja.

Kualitas anggaran pada dasarnya mencerminkan sejauh mana anggaran mampu memenuhi tujuan pembangunan secara efektif dan efisien. Kualitas ini dapat diukur melalui beberapa dimensi utama, seperti relevansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas (Wibowo, 2018). Di Aceh, kualitas anggaran masih menjadi isu krusial, ditandai dengan rendahnya tingkat realisasi beberapa program dan belum optimalnya pencapaian target kinerja. Hal ini mengindikasikan perlunya perbaikan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran agar lebih berbasis pada kebutuhan nyata dan data empiris.

Penggunaan data dan informasi yang akurat dalam penyusunan anggaran terbukti berpengaruh signifikan terhadap kualitas anggaran. Daerah yang mengintegrasikan sistem informasi dan data berbasis fakta dalam proses penganggaran cenderung menghasilkan anggaran yang lebih berkualitas (Sari & Nasution, 2020). Implementasi teknologi informasi, seperti sistem e-budgeting, menjadi salah satu solusi strategis untuk meningkatkan transparansi, mempermudah pemantauan, serta mendukung evaluasi kinerja program secara berkelanjutan (Mauliansyah, 2025).

Hubungan antara anggaran berbasis kinerja dan kualitas anggaran bersifat kausal dan saling menguatkan. Anggaran berbasis kinerja mendorong orientasi pada hasil, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap kualitas anggaran (O'Sullivan, 2019). Namun, efektivitas hubungan tersebut sangat dipengaruhi oleh kualitas SDM yang terlibat. Daerah yang memiliki aparatur terlatih dan memahami konsep anggaran berbasis kinerja terbukti mampu menghasilkan anggaran dengan kualitas yang lebih baik (Haryanto, 2021; inayah, 2025).

Selain itu, penerapan anggaran berbasis kinerja juga membuka ruang partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam proses penganggaran. Dengan indikator kinerja yang jelas dan informasi yang mudah diakses, masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi penggunaan anggaran dan menilai capaian program pemerintah. Partisipasi ini tidak hanya meningkatkan legitimasi kebijakan anggaran, tetapi juga memperkuat kualitas anggaran agar lebih responsif terhadap kebutuhan publik.

Temuan empiris dari berbagai penelitian sebelumnya menegaskan adanya hubungan signifikan antara anggaran berbasis kinerja, kualitas sumber daya manusia, dan kualitas anggaran. Mulyadi (2020) menunjukkan bahwa konsistensi penerapan anggaran berbasis kinerja berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas anggaran di pemerintah daerah. Sementara itu, Fitria dan Rahman (2021) menemukan bahwa kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap kualitas anggaran, khususnya dalam perancangan program yang efektif dan efisien. Dengan demikian, penguatan anggaran berbasis kinerja yang didukung oleh pengembangan SDM yang berkelanjutan merupakan strategi fundamental dalam meningkatkan kualitas anggaran dan pelayanan publik di pemerintah daerah.

3. METODE PENELITIAN

enelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan untuk menguji pengaruh anggaran berbasis kinerja dan sumber daya manusia terhadap kualitas

anggaran pada satuan kerja pemerintah Aceh. Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan pengukuran hubungan antarvariabel secara objektif dan terukur melalui analisis statistik inferensial. Penelitian ini juga bersifat deskriptif-eksplanatori, yaitu tidak hanya menggambarkan karakteristik variabel yang diteliti, tetapi juga menjelaskan hubungan kausal antara variabel independen dan variabel dependen berdasarkan hipotesis yang dikembangkan dari teori dan temuan empiris sebelumnya (Sugiyono, 2019).

Populasi penelitian mencakup seluruh satuan kerja pemerintah Aceh yang terlibat dalam proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Aceh, jumlah satuan kerja yang beroperasi mencapai sekitar 300 unit. Penentuan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling, yaitu pemilihan unit analisis secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu, khususnya satuan kerja yang telah menerapkan anggaran berbasis kinerja. Teknik ini dipilih untuk memastikan bahwa responden memiliki pemahaman dan pengalaman yang relevan dengan variabel yang diteliti. Dengan menggunakan rumus Slovin dan tingkat kesalahan sebesar 10 persen, diperoleh jumlah sampel yang representatif untuk menggambarkan kondisi empiris pengelolaan anggaran di lingkungan Pemerintah Aceh.

Pengumpulan data primer dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada aparatur yang terlibat langsung dalam pengelolaan anggaran pada satuan kerja terpilih. Kuesioner disusun berdasarkan indikator-indikator utama dari variabel anggaran berbasis kinerja, sumber daya manusia, dan kualitas anggaran, serta menggunakan skala Likert untuk mengukur tingkat persepsi responden. Untuk memperkaya pemahaman kontekstual, wawancara terbatas juga dilakukan dengan beberapa pimpinan satuan kerja guna memperoleh gambaran implementasi anggaran berbasis kinerja secara lebih mendalam. Selain itu, data sekunder dikumpulkan dari dokumen resmi pemerintah, laporan keuangan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran dan kinerja organisasi publik.

Instrumen penelitian berupa kuesioner diuji validitas dan reliabilitasnya sebelum digunakan secara luas. Validitas instrumen diuji melalui validitas konstruk dengan memastikan bahwa setiap item pertanyaan mampu merepresentasikan variabel yang diukur. Sementara itu, reliabilitas instrumen diukur menggunakan koefisien Cronbach's Alpha, di mana nilai di atas 0,70 menunjukkan tingkat konsistensi internal yang dapat diterima (Sekaran & Bougie, 2016). Uji coba instrumen dilakukan pada sejumlah responden terbatas untuk mengidentifikasi potensi bias, ambiguitas, atau ketidakjelasan redaksi pertanyaan, sehingga instrumen yang digunakan dalam penelitian utama telah memenuhi standar pengukuran yang andal.

Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda untuk menguji pengaruh anggaran berbasis kinerja dan sumber daya manusia terhadap kualitas anggaran, baik secara parsial maupun simultan. Sebelum analisis regresi

dilakukan, data terlebih dahulu diuji melalui uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas guna memastikan bahwa model regresi memenuhi kriteria statistik yang disyaratkan. Hasil analisis regresi kemudian diinterpretasikan untuk menjelaskan arah dan besaran pengaruh masing-masing variabel independen terhadap kualitas anggaran. Temuan empiris yang diperoleh diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian penganggaran sektor publik, sekaligus menjadi dasar rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah Aceh dalam upaya meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah.

4. HASIL PENELITIAN

Karakteristik responden dalam penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas aparatur yang terlibat dalam pengelolaan anggaran pada Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) berada pada rentang usia produktif, yaitu 30–40 tahun, dengan dominasi responden perempuan dan sebagian besar telah berstatus menikah. Dari sisi pendidikan, hampir setengah responden merupakan lulusan sarjana, sementara masa kerja yang paling dominan berada pada rentang 5–10 tahun. Profil ini mengindikasikan bahwa responden memiliki pengalaman kerja dan latar belakang pendidikan yang relatif memadai untuk memahami proses penyusunan dan pengelolaan anggaran, sehingga persepsi yang diberikan dapat merepresentasikan kondisi empiris organisasi secara cukup akurat.

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa kualitas anggaran Pemerintah Aceh dipersepsikan berada pada kategori baik, dengan nilai rata-rata sebesar 3,88 dari skala Likert lima poin. Temuan ini mengindikasikan bahwa secara umum responden menilai anggaran yang disusun telah memenuhi aspek partisipasi penganggaran, kejelasan sasaran, umpan balik, evaluasi, serta tingkat kesulitan anggaran yang wajar. Sementara itu, penerapan anggaran berbasis kinerja (ABK) memperoleh nilai rata-rata tertinggi sebesar 4,06, yang mencerminkan tingkat persetujuan responden terhadap implementasi prinsip-prinsip penganggaran yang berorientasi pada hasil dan kinerja. Variabel sumber daya manusia (SDM) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 3,63, yang meskipun berada pada kategori setuju, relatif lebih rendah dibandingkan variabel lainnya. Kondisi ini mengindikasikan adanya persepsi responden bahwa kualitas SDM pengelola anggaran di Pemerintah Aceh belum sepenuhnya optimal.

Pengujian kualitas instrumen penelitian menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur kualitas anggaran, ABK, dan SDM dinyatakan valid dan reliabel. Seluruh nilai koefisien korelasi item (r_{hitung}) lebih besar dari nilai r_{tabel} pada tingkat signifikansi 5%, sehingga instrumen dinyatakan mampu mengukur konstruk yang dimaksud secara tepat. Selain itu, nilai Cronbach's alpha masing-masing variabel berada di atas batas minimum 0,60, yang menegaskan bahwa kuesioner memiliki tingkat konsistensi internal yang baik dan dapat diandalkan sebagai alat pengumpulan data.

Hasil pengujian regresi linear berganda menunjukkan bahwa anggaran berbasis kinerja dan sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas anggaran SKPA. Persamaan regresi yang dihasilkan menunjukkan bahwa peningkatan penerapan ABK dan kualitas SDM secara simultan akan meningkatkan kualitas anggaran. Secara parsial, ABK memiliki koefisien regresi sebesar 0,320 yang menunjukkan bahwa peningkatan penerapan anggaran berbasis kinerja berkontribusi terhadap peningkatan kualitas anggaran sebesar 32%. Sementara itu, SDM memiliki koefisien regresi sebesar 0,289 yang mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia berkontribusi terhadap peningkatan kualitas anggaran sebesar 28,9%. Hasil uji-t menunjukkan bahwa kedua variabel independen berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kualitas anggaran, sedangkan hasil uji-F menegaskan bahwa ABK dan SDM secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas anggaran SKPA.

Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,322 menunjukkan bahwa variasi kualitas anggaran dapat dijelaskan oleh penerapan anggaran berbasis kinerja dan kualitas sumber daya manusia sebesar 32,2%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,567 mengindikasikan adanya hubungan yang cukup kuat antara variabel independen dan kualitas anggaran. Temuan ini menegaskan bahwa meskipun ABK dan SDM memiliki peran penting, peningkatan kualitas anggaran juga memerlukan perhatian terhadap variabel lain seperti kepemimpinan, budaya organisasi, pengawasan, dan sistem informasi keuangan.

Pengaruh positif anggaran berbasis kinerja terhadap kualitas anggaran menunjukkan bahwa orientasi penganggaran pada hasil dan kinerja mampu mendorong penyusunan anggaran yang lebih berpihak pada kepentingan publik. Anggaran yang berkualitas pada hakikatnya adalah anggaran yang mampu merefleksikan kebutuhan masyarakat dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Penerapan ABK mendorong setiap satuan kerja untuk mengaitkan alokasi anggaran dengan capaian kinerja yang terukur, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa penerapan ABK berpengaruh signifikan terhadap kualitas anggaran pemerintah daerah (Octariani et al., 2017).

Selain itu, penerapan ABK dalam konteks Pemerintah Aceh juga tercermin dari mekanisme penyusunan anggaran yang mengakomodasi aspirasi masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Proses ini menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa anggaran yang disusun selaras dengan kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada output pelayanan publik. Penekanan pada prestasi kerja dan kontrak kinerja, sebagaimana diatur dalam regulasi pengelolaan keuangan daerah, semakin memperkuat peran ABK sebagai instrumen peningkatan kualitas anggaran.

Sumber daya manusia juga terbukti berpengaruh signifikan terhadap kualitas anggaran SKPA. Aparatur yang memiliki kompetensi, pengalaman, dan pemahaman yang memadai dalam pengelolaan anggaran akan lebih mampu menyusun anggaran secara rasional, efektif, dan efisien. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kualitas SDM berpengaruh positif terhadap kualitas anggaran pemerintah daerah (Octariani et al., 2017). Namun demikian, hasil penelitian ini juga mengungkap adanya indikasi perilaku oportunistik dalam penyusunan anggaran di Pemerintah Aceh, yang mencerminkan bahwa kualitas SDM yang dimiliki belum sepenuhnya dioptimalkan.

Indikasi perilaku oportunistik tersebut tercermin dari besarnya alokasi belanja barang dan belanja hibah dalam struktur APBA yang rata-rata mencapai lebih dari separuh total belanja setiap tahunnya selama periode 2011–2015. Tren peningkatan alokasi belanja tersebut mengindikasikan adanya potensi penyimpangan orientasi anggaran dari kepentingan publik menuju kepentingan kelompok tertentu. Kondisi ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas SDM tidak hanya harus difokuskan pada aspek teknis dan kompetensi, tetapi juga pada penguatan integritas, etika, dan pengawasan dalam proses penganggaran.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas anggaran pada Satuan Kerja Pemerintah Aceh memerlukan penguatan penerapan anggaran berbasis kinerja yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas. Sinergi antara sistem penganggaran yang berorientasi kinerja dan kualitas aparatur yang memadai menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja dan kualitas sumber daya manusia memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas anggaran pada Satuan Kerja Pemerintah Aceh. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan, baik secara parsial maupun simultan, terhadap kualitas anggaran, yang tercermin dari meningkatnya kejelasan sasaran anggaran, partisipasi penganggaran, efektivitas evaluasi, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Anggaran berbasis kinerja terbukti menjadi instrumen strategis dalam mendorong orientasi penganggaran yang berfokus pada hasil dan kepentingan publik. Penerapan indikator kinerja yang jelas, mekanisme evaluasi yang terukur, serta keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran mampu meningkatkan kualitas alokasi anggaran dan memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah. Temuan ini menegaskan bahwa konsistensi dalam implementasi anggaran berbasis kinerja merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang berkualitas.

Di sisi lain, sumber daya manusia berperan sebagai faktor penggerak utama dalam proses penganggaran. Kompetensi, pengalaman, dan pemahaman aparatur terhadap sistem penganggaran berkontribusi signifikan terhadap kualitas anggaran yang dihasilkan. Namun demikian, hasil penelitian juga mengindikasikan bahwa kualitas sumber daya manusia di Pemerintah Aceh belum sepenuhnya optimal, yang tercermin dari masih adanya kecenderungan perilaku oportunistik dalam struktur belanja daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas anggaran tidak hanya membutuhkan penguatan kapasitas teknis aparatur, tetapi juga pembinaan integritas dan etika dalam pengelolaan keuangan publik.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas anggaran daerah memerlukan sinergi antara sistem anggaran berbasis kinerja yang efektif dan sumber daya manusia yang kompeten serta berintegritas. Temuan ini memiliki implikasi praktis bagi pemerintah daerah untuk memperkuat pelatihan, pengawasan, dan evaluasi kinerja aparatur, serta implikasi akademik dalam memperkaya literatur mengenai determinan kualitas anggaran di sektor publik, khususnya pada konteks pemerintahan daerah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Kepegawaian Negara (BKN). Data Pegawai Negeri Sipil di Aceh.
- Dessler, G. (2013). *Human resource management* (13th ed.). Pearson Education.
- Fitria, N., & Rahman, A. (2021). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas anggaran pada sektor publik. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 12(2), 85-98.
- Haryanto, T. (2021). Anggaran berbasis kinerja dan kualitas pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 45-60.
- Hasibuan, M. (2022). *Motivasi Pegawai dan Kinerja Anggaran*. Jurnal Administrasi Publik.
- Inayah, Z. (2026). COMPARATIVE ANALYSIS OF SPECIAL AUTONOMY FUND UTILIZATION: EVIDENCE FROM ACEH AND PAPUA. *Global Research in Economics and Advanced Theory (GREAT)*, 3(1), 1-13. <https://doi.org/10.65788/greatjournal.v3i1.92>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Laporan Kinerja Pemerintah Daerah*.
- Lembaga Administrasi Negara (LAN). (2020). *Laporan Hasil Penelitian tentang Pengembangan SDM di Sektor Publik*. Jakarta: LAN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

- MSDM, I. Sugiyono.(2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sianipar, R., & Salim, V.(2019). Faktor Etos Kerja Dan Lingkungan Kerja Dalam Membentuk 'Loyalitas Kerja' Pegawai Pada Pt Timur Raya Alam Damai. Anuar, S. 2019. Th. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(6), 3674..
- Mauliansyah, H. (2017). Pengaruh Waktu Penetapan Anggaran. Besaran Sisa Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), dan Perubahan Anggaran terhadap Serapan Anggaran pada Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sumatera Utara)(Doctoral dissertation, Tesis. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh).
- Mauliansyah, H. (2025). ASSESSING THE SUSTAINABILITY OF SPECIAL AUTONOMY FUNDS IN ACHIEVING DEVELOPMENT GOALS: THE CASE OF ACEH. *Sumber Informasi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (SIMBAN)*, 2(2), 1-10.
- Mulyadi, R. (2020). *Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kualitas Anggaran*. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik.
- Mulyadi. (2020). Implementasi anggaran berbasis kinerja dan dampaknya terhadap kualitas anggaran pemerintah daerah. *Jurnal Keuangan Publik*, 8(3), 201–215.
- O'Sullivan, J. (2019). Performance-based budgeting and public sector accountability. *Public Budgeting & Finance*, 39(4), 25–42.
- Octariani, D., Akram, A., & Animah, A. (2017). Good governance, performance based budgeting and SKPD budget quality SKPD (The case of a structural model approach). *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik*, 21(2), 117-131.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). *Organizational behavior* (17th ed.). Pearson Education.
- Sari, D. P., & Nasution, H. (2020). Data-driven budgeting and budget quality in local governments. *Journal of Public Sector Management*, 14(2), 133–148.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business: A Skill Building Approach*. Wiley.
- Supriyadi, A. (2020). *Kompetensi SDM dan Kualitas Anggaran*. Jurnal Manajemen Publik.
- Wibowo, A. (2018). *Manajemen Anggaran Publik*. Jakarta: Rajawali Press.
- World Bank. (2019). *Public Sector Performance: A Global Perspective*. Washington, D.C.: World Bank Publications.